



DPUPR
KABUPATEN
TEMANGGUNG



RENSTRA DPUPR

2025-2029



DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG

No.Telp(0293) 492421 Jl. Pahlawan no. 21 Temanggung dpupr.temanggungkab.go.id

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENSTRA TAHUN 2025-2029 PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



HANA AFIFAH, S.T.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19940822 202202 2 002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini juga mengacu pada RPJPD 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan RTRW Kabupaten Temanggung 2024–2044.

Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama lima tahun ke depan, Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas yang mendukung pencapaian visi “Temanggung untuk Semua: Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman.”

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Temanggung, 9 September 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	39
3.2 Strategi	44
3.3 Arah Kebijakan	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	51
4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah	96
4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)	98
4.4 Indikator Kinerja (IKK)	99
4.5 Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategi Nasional	103
4.6 Program Delegasi Gubernur Kepada Kabupaten/Kota dan Program Mandatory Pusat	110
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana DPUPR Kab. Temanggung ..	23
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPUPR Kab. Temanggung	24
Tabel 2.3	Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	29
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Kab. Temanggung .	30
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum ...	31
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	36
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR Kab. Temanggung	42
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra DPUPR Kab. Temanggung	45
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kab. Temanggung	48
Tabel 4.1	Program DPUPR Kab. Temanggung	52
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra DPUPR Kab. Temanggung	55
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan ...	80
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	97
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama DPUPR Kab. Temanggung	98
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci – Rancangan Awal Renstra Pemerintah Kab. Temanggung	101
Tabel 4.7	Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategi Nasional	107
Tabel 4.8	Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota	111
Tabel 4.9	Kegiatan Prioritas Utama RPJMD 2025-2029	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPUPR Kab. Temanggung	13
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	39
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	40
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang. Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang. Pembangunan di bidang pekerjaan umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur agar terselenggara konektivitas daerah terpencil dengan layanan dasar, sedangkan pembangunan di bidang penataan ruang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

- 1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
- 4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 1. Uraian program
- 2. Uraian kegiatan
- 3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
3. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

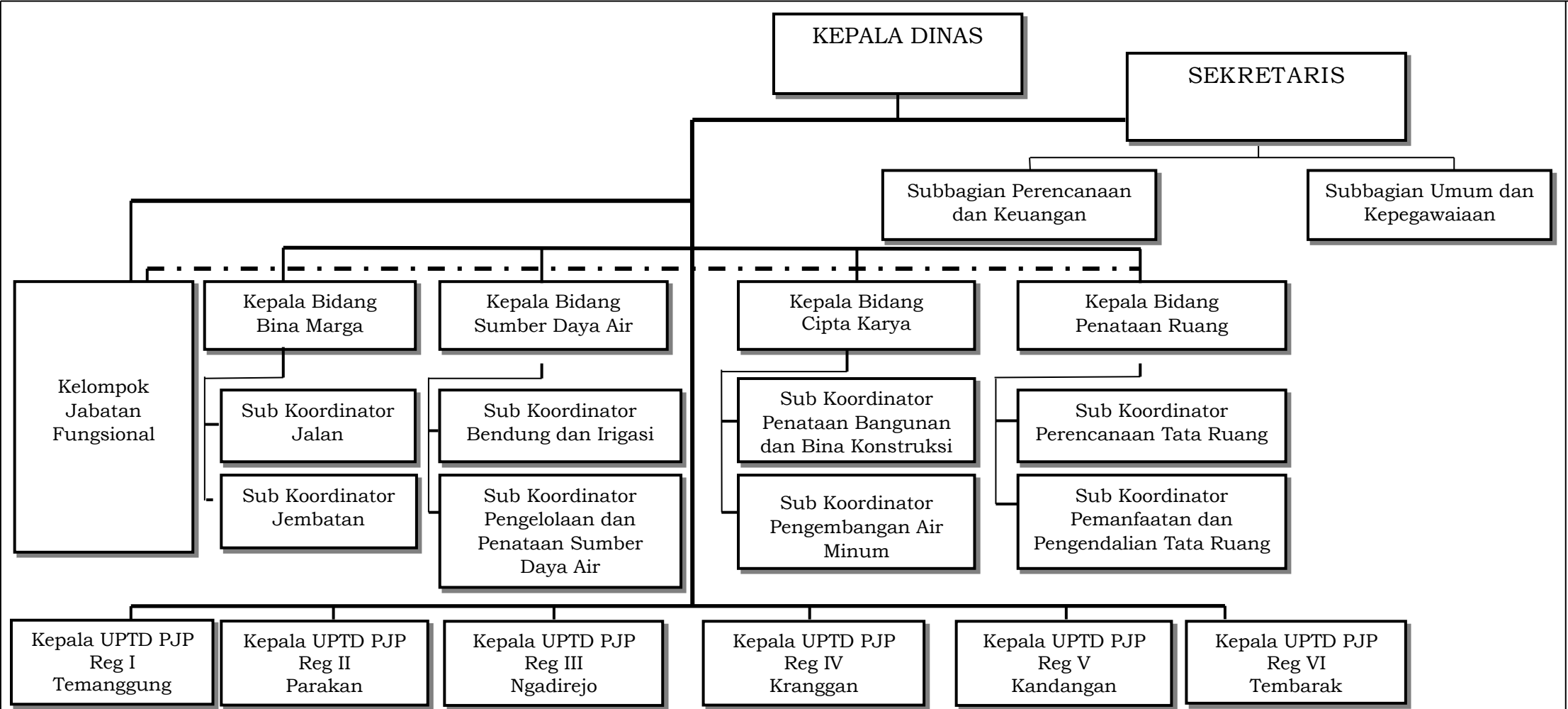
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Sub Koordinator Jalan; dan
 - b. Sub Koordinator Jembatan.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi.
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.
6. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kepala UPTD
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung;
 - b. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan;
 - c. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo;
 - d. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan;
 - e. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan; dan
 - f. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Sub Koordinator sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;

- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin

oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan; dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi:

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
 - b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.
- Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur

lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/PANGKAT)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SMP	SLTA	D 1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																
Eselon 2							1					1				
KEPALA DINAS							1					1				
Eselon 3						1	3					4				
SEKRETARIS							1					1				
Eselon 4					2	9	1				11	1				
Fungsional	2	50			9	27	1		1	44	43	1				
P3K					1											
TOTAL	2	50			12	37	8		1	44	54	9				

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1389 Bidang	281.175.201.126,00	Kondisi baik
2.	Peralatan dan Mesin	827 Unit	8.310.330.648,00	Kondisi baik 88%, rusak berat 12%
3.	Gedung dan Bangunan	45 Unit	10.466.361.479,00	Baik
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1959 Unit	1.755.784.329.411,00	Kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat
5.	Aset Tetap Lainnya		9.241.500,00	Kondisi baik
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.049.151.210,00	
7.	Aset Lainnya		16.287.308.672,00	
8.	Ekstrakomtabel		347.211.002,00	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak lepas dari keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Capaian indikator program selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
 Capaian Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
I.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Rata-rata dari hasil persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak	82.37%	83.70%	83.80%	84.71%	85.07%
II.	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Luas lahan yang sudah dimanfaatkan sesuai tata ruang terhadap luas lahan Kabupaten	88.50%	88.53%	88.56%	89.56%	90.18%
1	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Jumlah keseluruhan areal irigasi yang kondisi baik dibagi jumlah total luas areal irigasi dikalikan 100 %	59.97%	58.12%	58.83%	59.36%	59.36%
2	Cakupan pelayanan Daerah Irigasi	Jumlah area layanan DI / Jumlah luas total areal DI	91.89%	95%	97.97%	98.32%	98.67%
3	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Jumlah Pelanggan PDAM / Total Jumlah KK	93.90%	94.52%	95.32%	95.95%	97.65%
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun ndikalikan 100%	Na.	Na.	Na.	Na.	100%
5	Persentase Drainase Kondisi Baik	Panjang drainase kondisi baik / total panjang drainase Kabupaten	46.59%	22.54%	69.04%	69.21%	69.15%
6	Persentase Trotoar Kondisi Baik	Panjang trotoar kondisi baik dibagi panjang trotoar kewenangan kabupaten dikalikan100%	Na.	75.66%	73.93%	66.66%	68.61%
7	Persentase Terbangunnya Gedung Pemerintah	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun dibagi Jumlah Pengesahan DED Gedung Pemerintah dikalikan 100%	Na.	Na.	Na.	Na.	93.42%
8	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Panjang jaringan jalan kondisi mantap/ panjang jalan kabupaten	83.33%	89.29%	88.15%	89.16%	88.92%
9	Persentase Jembatan Kondisi Baik	Jumlah jembatan kondisi baik / total jumlah jembatan kabupaten	92.28%	92.88%	92.88%	94.36%	94.36%

NO	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase Jaringan Jalan Dengan Lebar Sesuai Standar	Panjang jaringan jalan dengan lebar sesuai standar / panjang jalan kabupaten	NA	NA	NA	22.48%	22.59%
11	Persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang	Luas lahan yang sudah dimanfaatkan sesuai tata ruang terhadap luas lahan Kabupaten	88.50%	88.53%	88.56%	89.56%	90.18%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja indikator program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat disimpulkan:

1. Persentase jaringan irigasi kondisi baik dari tahun 2020 s.d. 2024 terus meningkat, sempat menurun di tahun 2021 dampak pandemi COVID-19 karena rasionalisasi anggaran dan kembali stabil di tahun-tahun selanjutnya. Sedangkan cakupan area layanan irigasi s.d. 2024 mencapai 17.472,85 Ha dari total luasan area irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung.
2. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak/air bersih kabupaten Temanggung 268.376 KK (97,65%) dari jumlah total rumah tangga Kabupaten Temanggung. Masih terdapat 6.439 (2,35%) rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak/air bersih. Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tersebut terdiri dari 79,65% rumah tangga dengan akses jaringan perpipaan dan 18% rumah tangga dengan jaringan bukan perpipaan.
3. Panjang Drainase Perkotaan di Kabupaten Temanggung pada akhir tahun 2024 sepanjang 155.363 m yang terdiri dari kondisi baik 107.431 m (69,15%), kondisi sedang 29.623 m (19,07%) dan kondisi rusak berat 18.309 m (11,78%). Jaringan drainase perkotaan memainkan peran krusial dalam menjaga keutuhan, fungsi, dan keamanan jalan dengan cara mengelola kelebihan air permukaan dan air tanah yang dapat menyebabkan kerusakan. Fungsi utamanya meliputi pencegahan genangan dan banjir, pengendalian erosi serta kerusakan infrastruktur, dan penjagaan kualitas air.

4. Panjang trotoar kewenangan kabupaten Temanggung pada akhir tahun 2024 sepanjang 75.972,01 meter yang terdiri dari kondisi baik 52.121,01 meter (68,61%) dan kondisi rusak 22.956 meter (30,22%). Kerusakan trotoar disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat ulah manusia. Berikut adalah penyebab utama kerusakan trotoar antara lain:
 - a. Faktor alam (akar pohon, perubahan cuaca ekstrem dan erosi tanah);
 - b. Faktor teknis dan konstruksi (kualitas material, konstruksi tidak sesuai standar dan kurangnya perawatan); dan
 - c. Faktor aktivitas manusia (vandalisme, beban berlebih, penggalian utilitas dan pedagang kaki lima & aktivitas liar).Trotoar di Temanggung menunjukkan dua kondisi yaitu infrastruktur yang mulai tertata (dengan pembangunan citywalk pada tahun 2024) namun masih banyak yang membutuhkan perhatian serius—terutama dari aspek pemeliharaan, keberlanjutan, lingkungan, dan aksesibilitas. Ke depannya, sinergi antar OPD dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar trotoar bisa menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inklusif.
5. Persentase terbangunnya gedung pemerintah pada tahun 2024 yaitu 93,42% dengan perhitungan jumlah gedung pemerintah yang terbangun dibagi jumlah pengesahan DED gedung pemerintah dikalikan 100 %. Gedung pemerintah yang terbangun di tahun 2024 sejumlah 71 unit dari total 76 DED gedung yang disahkan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2023 capaian kinerja program Penataan Bangunan Gedung dihitung dengan indikator persentase gedung pemerintah kondisi baik yaitu 86,82%.
6. Jalan kondisi mantap Kabupaten Temanggung sepanjang 578,503 km (88,92%) sedangkan jalan kondisi tidak mantap 72,073 km (11,08%) terdiri dari kondisi rusak ringan, rusak berat dan telford. Kerusakan aspal disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi dan beban kendaraan yang melebihi tonase.

7. Jembatan yang dikelola Kabupaten Temanggung sejumlah 337 unit, dengan kondisi baik 318 unit dan kondisi rusak 19 unit. Kerusakan jembatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, disebabkan oleh beberapa faktor, terutama hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Selain itu, usia jembatan yang sudah tua juga menjadi faktor yang mempercepat kerusakan, bahkan menyebabkan robohnya jembatan.
8. Terdapat 120 ruas jalan di Kabupaten Temanggung lebarnya belum sesuai standar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan anggaran, perencanaan yang kurang matang, dan kondisi topografi wilayah. Lebar jalan yang tidak standar ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan kesulitan dalam aksesibilitas. Sedangkan jalan yang lebarnya sudah sesuai standar sejumlah 87 ruas dari total 207 ruas jalan. Lebar jalan sesuai standar 146,933 km (22,59%), sedangkan yang belum sesuai standar 503,543 km (77,41%) dari total panjang jalan Kabupaten Temanggung yaitu 650,476 km.
9. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang terus meningkat dari tahun 2020 s.d. tahun 2024. Namun kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang tersebut belum optimal karena belum tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan dan proses pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) belum terselenggara secara optimal.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

SPM Bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Temanggung adalah penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Sedangkan untuk indikator SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik menjadi kewenangan DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Perbandingan capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100	100	100	100	100	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dari tahun 2020 s.d. 2024 tercapai 100%. Penyediaan air minum sehari-hari dapat tercapai melalui kombinasi pengelolaan sumber daya air, infrastruktur yang memadai, dan upaya masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, pertumbuhan penduduk, dan kesehatan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya penyediaan air minum sehari-hari antara lain:

- 1) Ketersediaan dan Kualitas Sumber Air;
- 2) Infrastruktur dan Sistem Distribusi; dan
- 3) Pengelolaan dan Kebijakan;
- 4) Faktor Lingkungan dan Sosial.

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	82,37	83,70	83,79	84,71	85,07	
2.	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	88,50	88,54	88,56	89,56	90,18	

Berdasarkan Tabel 2.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung secara bertahap dan konsisten berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1. Persentase infrastruktur kondisi baik; dan
- 2. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

Persentase infrastruktur kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak. Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik adalah rata-rata dari semua variabel diatas. Persentase infrastruktur kondisi baik mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 karena

adanya dukungan dana dari beberapa sumber dana, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang terus meningkat dari tahun 2020 s.d. tahun 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, yang mencakup berbagai mekanisme dan melibatkan berbagai pihak, serta didorong oleh kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dalam berbagai bidang, termasuk capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020 s.d. 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	72,7	0	100	0	0	
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0	0	100	0	0	
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	91,89 100	97,87	97,97	98,32	98,66	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	93,9	94,51	95,31	95,94	97,68	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten						
5.	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	-	-	100	100	100	Tahun 2023 perizinan permohonan PBG masuk ke DPUPR
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	83,3	89,28	88,14	89,16	88,92	
7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	100	100	100	100	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	0	100	100	

Berdasarkan tabel 2.5 diatas capaian IKK Urusan Pekerjaan Umum secara keseluruhan mengalami peningkatan tren dari tahun 2020 s.d. tahun 2024. Namun terdapat indikator yang menurun pada tahun 2024 dari capaian tahun 2023, yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, menurun 0,24% dari capaian tahun 2023. Penyebab utama capaian IKK bidang urusan pekerjaan umum tidak tercapai antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran;
- 2) Belum optimalnya regulasi dan pemanfaatan ruang;
- 3) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menjadi kendala;
- 4) Dampak Pandemi Covid-19 mengharuskan rasionalisasi anggaran dan membatasi kegiatan yang memerlukan interaksi massa seperti rapat dan sosialisasi, sehingga menghambat beberapa program;
- 5) Masih ada tantangan dalam memenuhi standar teknis dan keselamatan jalan, serta pemenuhan kebutuhan prasarana jalan, irigasi, sanitasi layak, dan air bersih;
- 6) Faktor alam atau lingkungan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek pekerjaan umum;
- 7) Belum tersedianya database ke-PU-an berbasis GIS juga dapat menjadi kendala; dan

- 8) Belum diterapkannya sistem reward and punishment yang efektif dapat mempengaruhi kinerja.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain. Masyarakat yang merupakan kelompok sasaran layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelenggaraan pelayanan. Perangkat Daerah yang menjadi mitra antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Satpol PP dan Damkar;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;

Sedangkan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berupa dukungan data air minum perkotaan dan tenaga ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Kabupaten Temanggung.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan;
2. Akses air minum aman masih rendah;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bangunan Gedung;
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor ekonomi;
5. Belum meratanya permukaan jalan kondisi mantap;
6. Belum optimalnya kualitas jembatan;
7. Belum meratanya penyediaan drainase perkotaan kondisi baik;
8. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan;
9. Belum meratanya ketersediaan jalur pejalan kaki kondisi baik;
10. Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang;
11. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan

dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1) Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2) Akses air minum aman masih rendah 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung 4) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor ekonomi 5) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung sektor olahraga 6) Belum meratanya permukaan jalan kondisi mantap 7) Belum optimalnya kualitas jembatan 8) Belum meratanya penyediaan drainase perkotaan kondisi baik 9) Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan 10) Belum meratanya ketersediaan jalur pejalan kaki kondisi baik 11) Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang 12) Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1) Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2) Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3) Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Konektivitas dan Aksesibilitas

Berdasarkan telaah potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung maupun KLHS Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD (isu Global, Isu Nasional dan isu Regional), maka dirumuskan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yaitu: Konektivitas dan Aksesibilitas.

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri. Pengembangan infrastruktur tersebut diprioritaskan juga pada kawasan pedesaan yang menghubungkan pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan harus didukung sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya. Pembangunan jalan diprioritaskan yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka daerah terisolir. Begitu juga pembangunan jalan dan jembatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Mengingat masyarakat terbesar adalah yang berprofesi petani dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan kebijakan pembangunan kedepan harus berbasis pada penyediaan infrastruktur pedesaan seperti peningkatan kualitas pada jalan-jalan jalur berekonomian antar desa dan antar desa-kota kecamatan.

Penyediaan dan pengembangan jaringan irigasi ditargetkan akan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dankerusakan jaringan irigasi lebih banyaknya disebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi akan mempengaruhi

produktifitas pertanian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan penataan ruang untuk lima tahun kedepan, didasari dengan isu strategis diantaranya :

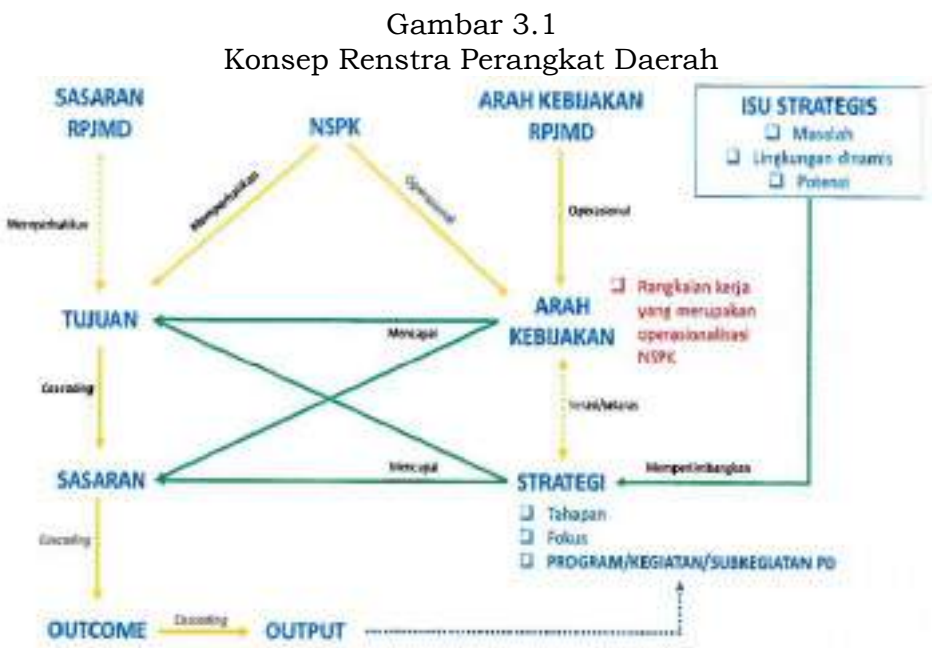
- a. Penyusunan RDTR membutuhkan proses yang sangat panjang;
- b. Masih banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

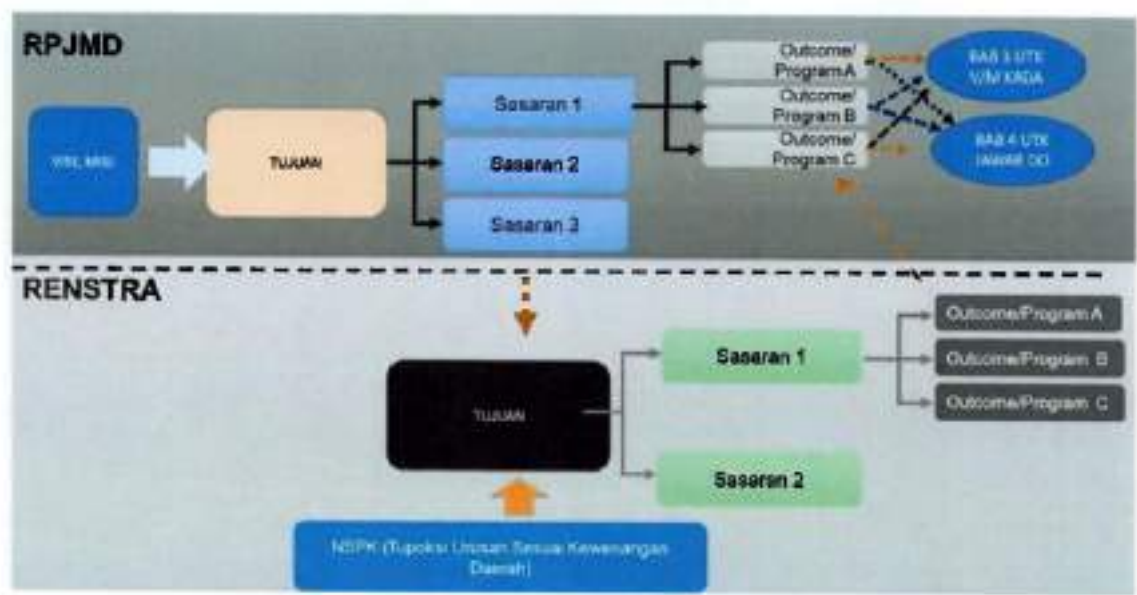
Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, DPUPR Kabupaten Temanggung merumuskan tujuan dan sasaran melalui program kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan; dan
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah mengemban misi ke-1 **“Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas”** dan sasaran ke-3 Pembangunan Daerah yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik”

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi ke 1 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas” selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung memiliki tujuan “Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat tercapai, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur bidang urusan pekerjaan umum; dan
2. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disajikan keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah yang Merata Guna Mendukung Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas		Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik (%)	54.61	61.96	66.54	71.11	75.67	80.27	80.61	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum (%)	55.79	62.12	62.88	63.63	64.37	65.21	65.82	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas (%)	53.43	61.81	70.20	78.58	86.97	95.34	95.39	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		yang Berkualitas									
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	85.60	85.65	85.70	85.75	85.80	85.85	85.90	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.75	73.80	73.85	73.90	73.95	74.00	74.05	

Ket :

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
BIDANG CIPTA KARYA					
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Pekerjaan Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (1.700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan M.T. Haryono (Pandean) dan Citywalk Parakan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pembangunan Citywalk Parakan (2700 m) dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan Sudirman (Telkom - Taman Kuda Lumping)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Taman Kuda Lumping (1.630 m) dan Pembangunan Citywalk Ngadirejo jalan Jumprit (Tugu Ngadirejo - Perempatan Carikan) (panjang 960 m)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pembangunan Citywalk Jl. Sudirman (Lanjutan) Telkom sampai dengan Taman Kuda Lumping (1.630 m) dan Pembangunan Citywalk Jl. M.T. Haryono (panjang 1200m)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Keciaptakaryaan melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pekerjaan Pemeliharaan Trotoar
2	Peningkatan kualitas dan akses layanan air bersih melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan tahapan sebagai berikut: 1. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan melalui pendataan dan survey	Peningkatan kualitas dan akses layanan air bersih melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan tahapan sebagai berikut: 1. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan melalui peningkatan, perluasan, pembangunan SPAM jaringan perpipaan	Peningkatan kualitas dan akses layanan air bersih melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan tahapan sebagai berikut: 1. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan melalui peningkatan, perluasan, pembangunan SPAM jaringan perpipaan	Peningkatan kualitas dan akses layanan air bersih melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan tahapan sebagai berikut: 1. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan melalui peningkatan, perluasan, pembangunan SPAM jaringan perpipaan	Peningkatan kualitas dan akses layanan air bersih melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan tahapan sebagai berikut: 1. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan melalui peningkatan, perluasan, pembangunan SPAM jaringan perpipaan

No	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	3. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum aman melalui pembinaan KPSPAM/Bumdes 4. Peningkatan rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan melalui penyediaan fasilitas air siap minum perpipaan bersama PDAM dan stakeholder terkait	2. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum aman melalui pembinaan/pemantauan kualitas air minum (sampling) 3. Peningkatan rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dengan penyediaan fasilitas air siap minum komunal	2. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum aman melalui pembinaan/pemantauan kualitas air minum (sampling) 3. Peningkatan rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dengan penyediaan fasilitas air siap minum komunal	2. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum aman melalui pembinaan/pemantauan kualitas air minum (sampling) 3. Peningkatan rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dengan penyediaan fasilitas air siap minum komunal	2. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum aman melalui pembinaan/pemantauan kualitas air minum (sampling) 3. Peningkatan rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dengan penyediaan fasilitas air siap minum komunal
BIDANG SUMBER DAYA AIR					
3	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 1 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 10 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 15 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 10 lokasi	Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 10 lokasi

No	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
BIDANG BINA MARGA					
4	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas infrastruktur kebinamargaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
BIDANG PENATAAN RUANG					
5	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Parakan	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Kranggan	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Pringsurat	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Ngadirejo	Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kawasan Candioto

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Keterangan
I.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan melalui: penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	1) Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air; 2) Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih; 3) Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya; 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung; 5) Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi; 6) Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan; 7) Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan; 8) Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selaras dengan sasaran 3 Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik”. Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung **“Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas”** dengan indikator tujuan Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik. DPUPR Kabupaten Temanggung memiliki 2 (dua) sasaran yaitu antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum; dan
- 2) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.

Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Temanggung, DPUPR Kabupaten Temanggung memiliki program kegiatan yang akan diterapkan pada tahun 2025 -2030 diantaranya:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penyelenggaraan Jalan;
7. Program Pengembangan Jasa konstruksi; dan
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2025-2030, sebagaimana berikut ini:

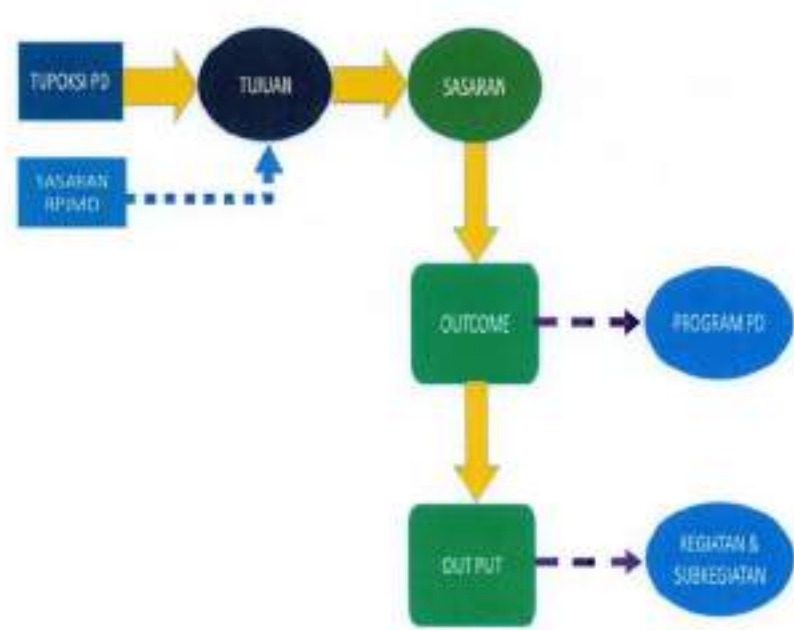
- 1) Penataan garis imajiner dengan program aksi:
 - Pembangunan city walk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan S. Parman, Jalan R. Suprpto, dan Jalan M.T. Haryono

- Pembangunan citywalk Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjend Katamsa);
 - Pembangunan citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo);
- 2) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan dengan program aksi :
- Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten;
 - Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi; dan
 - Penyediaan air bersih dan sanitasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 telah mengakomodir saran dan masukan dari instansi/lembaga/Perangkat Daerah, Tim Ahli Bupati, Penggiat Lingkungan dan Kelompok Ekonomi Kreatif.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					43.439.862.572,00		54.225.131.460,00		55.831.625.413,00		48.582.367.894,00		41.169.617.634,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.963.362.572,00		11.054.780.010,00		11.232.509.078,00		11.571.143.371,00		11.529.743.632,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	10.963.362.572,00	100	11.054.780.010,00	100	11.232.509.078,00	100	11.571.143.371,00	100	11.529.743.632,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.063.000.000,00		3.065.144.100,00		3.107.749.603,00		3.166.175.296,00		3.168.391.618,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	58.87	58.75	59.26	3.063.000.000,00	59.77	3.065.144.100,00	60.00	3.107.749.603,00	61.56	3.166.175.296,00	61.66	3.168.391.618,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					275.000.000,00		275.192.500,00		279.017.676,00		284.263.208,00		284.462.192,00	
Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	59.01	59.01	59.02	275.000.000,00	59.03	275.192.500,00	59.04	279.017.676,00	59.05	284.263.208,00	59.06	284.462.192,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	19.08	26.64	31.14		35.63		40.13		44.62		48.31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	19.08	26.63	31.13		35.62		40.12		44.61		48.3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.088.000.000,00		1.088.761.600,00		1.103.895.386,00		1.124.648.620,00		1.125.435.874,00	
Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik (%)	69.15	69.20	69.25	1.088.000.000,00	69.30	1.088.761.600,00	69.35	1.103.895.386,00	69.40	1.124.648.620,00	69.45	1.125.435.874,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.245.000.000,00		2.246.571.500,00		2.277.798.843,00		2.320.621.462,00		2.322.245.897,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	-	80	80.25	2.245.000.000,00	80.50	2.246.571.500,00	80.75	2.277.798.843,00	81	2.320.621.462,00	81.25	2.322.245.897,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG (%)	62.84	64.24	64.64		65		65.42		65.84		66.26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00	
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik (%)	68.61	68.62	68.63	4.733.000.000,00	68.64	15.407.431.000,00	68.65	16.450.291.291,00	68.66	8.333.201.567,00	68.67	941.776.432,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	6.95	10.12	10.13		10.14		10.15		10.16		10.17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					20.060.000.000,00		20.074.042.000,00		20.353.071.184,00		20.735.708.922,00		20.750.223.918,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	88.92	89.50	89.85	20.060.000.000,00	90.19	20.074.042.000,00	90.54	20.353.071.184,00	90.88	20.735.708.922,00	91.23	20.750.223.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	94.36	94.36	94.37		94.38		94.39		94.40		94.41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan (%)	22.59	22.59	22.62		22.64		22.67		22.69		22.72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00	
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina (%)	-	100	100	62.500.000,00	100	62.543.750,00	100	63.413.108,00	100	64.605.275,00	100	64.650.498,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					950.000.000,00		950.665.000,00		963.879.244,00		982.000.173,00		982.687.573,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang (%)	90.18	90.28	90.38	950.000.000,00	90.48	950.665.000,00	90.58	963.879.244,00	90.68	982.000.173,00	90.78	982.687.573,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan (%)	16.67	33.34	50.01		66.68		83.35		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					43.439.862.572,00		54.225.131.460,00		55.831.625.413,00		48.582.367.894,00		41.169.617.634,00	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas				Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum			Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Panjang Jaringan Irigasi yang Dikelola	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih		Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
					Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
					Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya Kualitas Jaringan Drainase Perkotaan		Presentase saluran drainase kondisi baik	1.03.06 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dikelola	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung	
					Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya		Persentase Trotoar Kondisi Baik	1.03.09 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
					Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	1.03.09 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Panjang jalan yang dikelola dan jumlah jembatan yang dikelola	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi		Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Jumlah lembaga konstruksi yang dibina	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas			Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas		
			Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang		Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Jumlah RDTR yang ditetapkan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	1.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase ketersediaan laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, DPUPR masuk dalam misi ke-1 “Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas” dan sasaran ke-3 yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik” selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung memiliki tujuan **Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas.**

Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum; dan
2. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2025 – 2029 dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - 1.1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1.1. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 1.1.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 1.1.2.2. Pembangunan Bendung Irigasi
 - 1.1.2.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 1.1.2.4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- 1.1.2.5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 1.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 1.2.1.2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 1.3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 1.3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
 - 1.3.1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 1.4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - 1.4.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1.1. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
- 1.5. Program penataan bangunan gedung;
 - 1.5.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 1.5.1.1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5.1.2. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5.1.3. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),

Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui
SIMBG

- 1.6. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 1.6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1.6.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 1.6.1.2. Pengelolaan Ledger Jalan
 - 1.6.1.3. Rekonstruksi Jalan
 - 1.6.1.4. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 1.6.1.5. Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - 1.6.1.6. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - 1.6.1.7. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 1.6.1.8. Rehabilitasi Jalan
 - 1.6.1.9. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 1.7. Program Pengembangan Jasa konstruksi
 - 1.7.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 1.7.1.1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- 2. Urusan Penataan Ruang
 - 4.2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - 4.2.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 4.2.1.1. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
 - 4.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5. Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 5.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5.1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5.1.2.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5.1.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.1.3.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.1.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.1.4.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program-program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				43.439.862.572,00		54.225.131.460,00		55.831.625.413,00		48.582.367.894,00		41.169.617.634,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.963.362.572,00		11.054.780.010,00		11.232.509.078,00		11.571.143.371,00		11.529.743.632,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	10.963.362.572,00	100	11.054.780.010,00	100	11.232.509.078,00	100	11.571.143.371,00	100	11.529.743.632,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.040.491.618,00		10.322.701.786,00		10.444.397.512,84		10.661.840.670,55		10.766.034.465,18		
Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	122	10.040.491.618,00	122	10.322.701.786,00	122	10.444.397.512,84	122	10.661.840.670,55	122	10.766.034.465,18		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.040.491.618,00		10.322.701.786,00		10.444.397.512,84		10.661.840.670,55		10.766.034.465,18		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	122	10.040.491.618,00	122	10.322.701.786,00	122	10.444.397.512,84	122	10.661.840.670,55	122	10.766.034.465,18		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.000.000,00		125.875.000,00		127.624.662,50		130.024.006,15		129.672.941,34		
Persentase ketersediaan laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12	130.000.000,00	12	125.875.000,00	12	127.624.662,50	12	130.024.006,15	12	129.672.941,34		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	48		48		48		48		48			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12		12		12		12		12			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				10.000.000,00		10.070.000,00		10.209.973,00		10.401.920,49		10.373.835,31		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12	10.000.000,00	12	10.070.000,00	12	10.209.973,00	12	10.401.920,49	12	10.373.835,31		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.210.000,00		30.629.919,00		31.205.761,48		31.121.505,92		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	48	30.000.000,00	48	30.210.000,00	48	30.629.919,00	48	31.205.761,48	48	31.121.505,92		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		15.105.000,00		15.314.959,50		15.602.880,74		15.560.752,96		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12	20.000.000,00	12	15.105.000,00	12	15.314.959,50	12	15.602.880,74	12	15.560.752,96		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.140.000,00		20.419.946,00		20.803.840,98		20.747.670,61		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12	20.000.000,00	12	20.140.000,00	12	20.419.946,00	12	20.803.840,98	12	20.747.670,61		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.350.000,00		51.049.865,00		52.009.602,46		51.869.176,54		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12	50.000.000,00	12	50.350.000,00	12	51.049.865,00	12	52.009.602,46	12	51.869.176,54		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				645.370.954,00		448.661.224,00		452.860.918,86		563.499.132,15		418.835.218,16		
Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12	645.370.954,00	12	448.661.224,00	12	452.860.918,86	12	563.499.132,15	12	418.835.218,16		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12		12		12		12		12			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		90.630.000,00		91.889.757,00		93.617.284,43		93.364.517,76		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12	100.000.000,00	12	90.630.000,00	12	91.889.757,00	12	93.617.284,43	12	93.364.517,76		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				545.370.954,00		358.031.224,00		360.971.161,86		469.881.847,72		325.470.700,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12	545.370.954,00	12	358.031.224,00	12	360.971.161,86	12	469.881.847,72	12	325.470.700,40		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.000.000,00		156.042.000,00		206.125.983,80		214.279.562,15		213.701.007,32		
Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48	146.000.000,00	48	156.042.000,00	48	206.125.983,80	48	214.279.562,15	48	213.701.007,32		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	51		51		51		51		51			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		208.038.409,85		207.476.706,14		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48	136.000.000,00	48	150.000.000,00	48	200.000.000,00	48	208.038.409,85	48	207.476.706,14		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		6.042.000,00		6.125.983,80		6.241.152,30		6.224.301,18		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	51	10.000.000,00	51	6.042.000,00	51	6.125.983,80	51	6.241.152,30	51	6.224.301,18		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-		-		-		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				3.063.000.000,00		3.065.144.100,00		3.107.749.603,00		3.166.175.296,00		3.168.391.618,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58.87	59.26	3.063.000.000,00	59.77	3.065.144.100,00	60.00	3.107.749.603,00	61.56	3.166.175.296,00	61.66	3.168.391.618,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.105.000,00		152.191.460,00		155.052.659,00		155.161.196,00		
Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	3	150.000.000,00	3	150.105.000,00	3	152.191.460,00	3	155.052.659,00	3	155.161.196,00		
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				150.000.000,00		150.105.000,00		152.191.460,00		155.052.659,00		155.161.196,00		
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	3	150.000.000,00	3	150.105.000,00	3	152.191.460,00	3	155.052.659,00	3	155.161.196,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.913.000.000,00		2.915.039.100,00		2.955.558.143,00		3.011.122.637,00		3.013.230.422,00		
Panjang jaringan irigasi yang dikelola	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	-	-	2.913.000.000,00	-	2.915.039.100,00	-	2.955.558.143,00	-	3.011.122.637,00	-	3.013.230.422,00		
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	2		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	-	3		3		3		3		3			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859.43	859.43		859.43		859.43		859.43		859.43			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	8.931	0.016		0.016		0.016		0.016		0.016			
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				150.000.000,00		150.105.000,00		152.191.460,00		155.052.659,00		155.161.196,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	8.931	0.016	150.000.000,00	0.016	150.105.000,00	0.016	152.191.460,00	0.016	155.052.659,00	0.016	155.161.196,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				2.500.000.000,00		2.614.864.100,00		2.651.905.710,00		2.702.701.539,00		2.704.628.429,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859.43	859.43	2.500.000.000,00	859.43	2.614.864.100,00	859.43	2.651.905.710,00	859.43	2.702.701.539,00	859.43	2.704.628.429,00		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				100.000.000,00		100.070.000,00		101.460.973,00		103.368.439,00		103.440.797,00		
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	-	3	100.000.000,00	3	100.070.000,00	3	101.460.973,00	3	103.368.439,00	3	103.440.797,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				163.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	2	163.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi				-		-		-		-		-		
Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				275.000.000,00		275.192.500,00		279.017.676,00		284.263.208,00		284.462.192,00		
Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	100	275.000.000,00	100	275.192.500,00	100	279.017.676,00	100	284.263.208,00	100	284.462.192,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	19.08	31.14		35.63		40.13		44.62		48.31			
	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	59.01	59.02		59.03		59.04		59.05		59.06			
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	19.08	31.13		35.62		40.12		44.61		48.3			
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				275.000.000,00		275.192.500,00		279.017.676,00		284.263.208,00		284.462.192,00		
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	275.000.000,00	1	275.192.500,00	1	279.017.676,00	1	284.263.208,00	1	284.462.192,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	5		5		5		5		5			
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				125.000.000,00		125.192.500,00		129.017.676,00		134.263.208,00		134.462.192,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	5	125.000.000,00	5	125.192.500,00	5	129.017.676,00	5	134.263.208,00	5	134.462.192,00		
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.088.000.000,00		1.088.761.600,00		1.103.895.386,00		1.124.648.620,00		1.125.435.874,00		
Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik	69.15	69.25	1.088.000.000,00	69.30	1.088.761.600,00	69.35	1.103.895.386,00	69.40	1.124.648.620,00	69.45	1.125.435.874,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.088.000.000,00		1.088.761.600,00		1.103.895.386,00		1.124.648.620,00		1.125.435.874,00		
Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	1	1.088.000.000,00	1	1.088.761.600,00	1	1.103.895.386,00	1	1.124.648.620,00	1	1.125.435.874,00		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6	6		6		6		6		6			
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				688.000.000,00		688.481.600,00		698.051.494,00		711.174.862,00		711.672.685,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	1	688.000.000,00	1	688.481.600,00	1	698.051.494,00	1	711.174.862,00	1	711.672.685,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				400.000.000,00		400.280.000,00		405.843.892,00		413.473.758,00		413.763.189,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6	6	400.000.000,00	6	400.280.000,00	6	405.843.892,00	6	413.473.758,00	6	413.763.189,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				2.245.000.000,00		2.246.571.500,00		2.277.798.843,00		2.320.621.462,00		2.322.245.897,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	-	80.25	2.245.000.000,00	80.50	2.246.571.500,00	80.75	2.277.798.843,00	81	2.320.621.462,00	81.25	2.322.245.897,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	62.84	64.64		65		65.42		65.84		66.26			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				2.245.000.000,00		2.246.571.500,00		2.277.798.843,00		2.320.621.462,00		2.322.245.897,00		
Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	80	2.245.000.000,00	80	2.246.571.500,00	80	2.277.798.843,00	80	2.320.621.462,00	80	2.322.245.897,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	-	1		1		1		1		1			
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000.000,00		1.821.571.500,00		1.852.798.843,00		1.895.621.462,00		1.897.245.897,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	-	2	1.750.000.000,00	2	1.821.571.500,00	2	1.852.798.843,00	2	1.895.621.462,00	2	1.897.245.897,00		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				370.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	-	1	370.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00		
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	6.95	10.13	4.733.000.000,00	10.14	15.407.431.000,00	10.15	16.450.291.291,00	10.16	8.333.201.567,00	10.17	941.776.432,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Trotoar Kondisi Baik	68.61	68.63		68.64		68.65		68.66		68.67			
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-	2	4.733.000.000,00	2	15.407.431.000,00	1	16.450.291.291,00	2	8.333.201.567,00	1	941.776.432,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-	2	4.733.000.000,00	2	15.407.431.000,00	1	16.450.291.291,00	2	8.333.201.567,00	1	941.776.432,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				20.060.000.000,00		20.074.042.000,00		20.353.071.184,00		20.735.708.922,00		20.750.223.918,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	88.92	89.85	20.060.000.000,00	90.19	20.074.042.000,00	90.54	20.353.071.184,00	90.88	20.735.708.922,00	91.23	20.750.223.918,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	22.59	22.62		22.64		22.67		22.69		22.72			
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94.36	94.37		94.38		94.39		94.40		94.41			
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				20.060.000.000,00		20.074.042.000,00		20.353.071.184,00		20.735.708.922,00		20.750.223.918,00		
Panjang jalan yang dikelola dan jumlah jembatan yang dikelola	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	16	20	20.060.000.000,00	22	20.074.042.000,00	22	20.353.071.184,00	26	20.735.708.922,00	26	20.750.223.918,00		
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2	1		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6			2		2		3		3			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650.476	650.476		650.476		650.476		650.476		650.476			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2.202	0.661		0.661		0.661		0.661		0.661			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.208	-		0.145		0.145		0.145		0.145			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.304	0.39		0.415		0.438		0.329		0.33			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.144	1.45		0.415		0.438		0.329		0.33			
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				150.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650.476	650.476	150.000.000,00	650.476	450.000.000,00	650.476	450.000.000,00	650.476	450.000.000,00	650.476	450.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				8.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	16	20	8.000.000.000,00	22	10.000.000.000,00	22	10.000.000.000,00	26	10.000.000.000,00	26	10.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				4.258.000.000,00		3.534.396.000,00		3.621.749.104,00		3.216.537.988,00		3.221.082.064,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.144	1.45	4.258.000.000,00	0.415	3.534.396.000,00	0.438	3.621.749.104,00	0.329	3.216.537.988,00	0.33	3.221.082.064,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				-		1.505.250.000,00		1.609.572.976,00		2.752.632.946,00		2.758.059.790,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.208	-	-	0.145	1.505.250.000,00	0.145	1.609.572.976,00	0.145	2.752.632.946,00	0.145	2.758.059.790,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				4.443.000.000,00		1.534.396.000,00		1.621.749.104,00		1.216.537.988,00		1.221.082.064,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.304	0.39	4.443.000.000,00	0.415	1.534.396.000,00	0.438	1.621.749.104,00	0.329	1.216.537.988,00	0.33	1.221.082.064,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6		200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				2.809.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2.202	0.661	2.809.000.000,00	0.661	2.500.000.000,00	0.661	2.500.000.000,00	0.661	2.500.000.000,00	0.661	2.500.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00		
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	-	100	62.500.000,00	100	62.543.750,00	100	63.413.108,00	100	64.605.275,00	100	64.650.498,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00		
Jumlah lembaga konstruksi yang dibina	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-	30	62.500.000,00	30	62.543.750,00	30	63.413.108,00	30	64.605.275,00	30	64.650.498,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-	30	62.500.000,00	30	62.543.750,00	30	63.413.108,00	30	64.605.275,00	30	64.650.498,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				950.000.000,00		950.665.000,00		963.879.244,00		982.000.173,00		982.687.573,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	90.18	90.38	950.000.000,00	90.48	950.665.000,00	90.58	963.879.244,00	90.68	982.000.173,00	90.78	982.687.573,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	16.67	50.01		66.68		83.35		100		100			
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Jumlah RDTR yang ditetapkan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-	1	600.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				600.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-	1	600.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		250.665.000,00		263.879.244,00		282.000.173,00		282.687.573,00		
Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	1	150.000.000,00	1	250.665.000,00	1	263.879.244,00	1	282.000.173,00	1	282.687.573,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				150.000.000,00		250.665.000,00		263.879.244,00		282.000.173,00		282.687.573,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	1	150.000.000,00	1	250.665.000,00	1	263.879.244,00	1	282.000.173,00	1	282.687.573,00		

4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan (cascading) kinerja.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2025-2030, sebagaimana berikut ini:

- 1) Penataan garis imajiner dengan program aksi:
 - Pembangunan city walk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan S. Parman, Jalan R. Suprpto, dan Jalan M.T. Haryono
 - Pembangunan citywalk Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjend Katamsa);
 - Pembangunan citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo);
- 2) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan dengan program aksi :
 - Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten;
 - Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi; dan
 - Penyediaan air bersih dan sanitasi

Program Prioritas Pembangunan Daerah tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
2.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten memiliki 3 (tiga) program yang mendukung program prioritas pembangunan daerah antara lain:

- 1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 2. Program Penyelenggaraan Jalan; dan
- 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan strategis sebuah instansi, organisasi, atau program telah tercapai. IKU biasanya ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan sasaran strategis yang ingin dicapai, baik di tingkat nasional, daerah, maupun organisasi.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung tahun 2026-2030 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1.03.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum	%	55,79	62,12	62,88	63,63	64,37	65,21	65,82	
2.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkualitas	%	53,43	61,81	70,2	78,58	86,97	95,34	95,39	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu antara lain:

1. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; dan
2. Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.

Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum merupakan rata-rata dari capaian kinerja program bidang urusan pekerjaan umum secara keseluruhan meliputi Indeks Kinerja Sistem Irigasi, rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari, Rumah Tangga dengan akses air minum aman, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, presentase saluran drainase kondisi baik, persentase trotoar kondisi baik, persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, persentase gedung pemerintah kondisi baik, persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG, Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota, persentase Jembatan dalam kondisi baik, persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan dan persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina.

Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas merupakan rata-rata kinerja penyelenggaraan penataan ruang meliputi persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang dan persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan.

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, program, atau individu dalam mencapai tujuan strategisnya. IKK harus spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki batas waktu (SMART).

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Rancangan Awal Renstra Pemerintah Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		%	100	90.28	90.38	90.48	90.58	90.68	90.78	
2.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		%	98.66	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		%	96.47	96.67	96.87	97.07	97.27	97.47	97.67	
5.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal.		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		%	88.92	89.5	89.65	89.8	89.95	90.1	90.25	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		%	100	100	100	100	100	100	100	

4.5. Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional (PSN) adalah program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). PSN mencakup proyek-proyek prioritas nasional berskala besar dan strategis, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun pertahanan.

Program Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029 merupakan proyek dan program prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung sasaran pembangunan nasional yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. PSN dalam RPJMN 2025-2029 terdiri dari:

- a) 29 PSN Baru (fokus pada pangan, pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, digitalisasi); dan
- b) 48 PSN Lanjutan (carry over) (Proyek infrastruktur komprehensif: IKN, jalan tol, industrial park, SPAM, bendungan, MRT).

PSN Baru (29 Program) antara lain:

- 1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Nasional;
- 2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Berkualitas – Nasional;
- 3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul – Nasional;
- 4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota – Nasional;
- 5. Program Penuntasan TBC – Nasional;
- 6. Pengembangan Lumbung Pangan (Food Estate) – Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan;
- 7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat – Nasional;
- 8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional – Nasional;
- 9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi – Nasional;

10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan – Bali;
 11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura – Jawa Barat;
 12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa – DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten;
 13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi – Kalimantan Utara;
 14. Bioetanol (berbasis tebu) – Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Papua Selatan;
 15. Biorefinery Sumatera (Riau & Sumsel);
 16. RDMP RU VI Balongan (rescoping) – Jatim;
 17. Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar – beberapa provinsi;
 18. Hilirisasi Garam (Soda Ash) – Jatim;
 19. Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut – berbagai provinsi;
 20. Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, Tembaga – nasional;
 21. Pengembangan Industri Dirgantara: N219 Amfibi – Nasional;
 22. Pengembangan Industri Kimia: Chlor alkali & Ethylene Dichloride – Banten;
 23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu – Nasional;
 24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Indonesia – Nasional;
 25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu – Maluku;
 26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas – Sumatera;
 27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua;
 28. Pembangunan 3 Juta Rumah – Nasional;
 29. Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (ramah lingkungan) – beberapa kota besar;
- PSN Lanjutan (Carry Over, 48 Program) antara lain:
1. Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) – Jabar;
 2. Bendungan Way Apu – Maluku;
 3. Bendungan Jragung – Jateng;
 4. Bendungan Mbay – NTT;

5. Bendungan Bulango Ulu – Gorontalo;
6. SPAM Regional Wosusokas – Jateng;
7. SPAM Regional Benteng–Kobema – Bengkulu;
8. Pengembangan Lapangan Abadi Masela – Maluku;
9. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) – Jatim;
10. Pengembangan Biofuel Metanol dan Etanol – Bojonegoro, Jatim;
11. North Hub Development Project Selat Makassar;
12. RDMP RU IV Cilacap (rescoping);
13. Biorefinery Cilacap;
14. Jaringan Gas Perkotaan (Beberapa kota besar);
15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe – Aceh;
16. KEK Sei Mangkei – Sumut;
17. KEK Galang Batang – Kepri;
18. KI Terpadu Batang – Jateng;
19. KI Ketapang Bangun Sarana – Kalbar;
20. KIPI – Kaltara;
21. KI Weda Bay – Maluku
22. KI Bantaeng – Sulsel
23. KI Teluk Bintuni (metanol, amonia, CCUS/CCS) – Papua Barat;
24. KI Tanah Kuning – Kaltara;
25. KI Pulau Ladi – Kepri;
26. KI Fakfak – Papua Barat;
27. Dahuaxing Industrial Park – Sulteng;
28. Huali Industry Park – Sulsel;
29. Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Park – Kepri;
30. Giga Industry Park – Sultra;
31. Kolaka Resources Industrial Park – Sultra;
32. Aspire Stargate – Sultra;
33. Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran – Kepri;
34. Tekno Hijau Konasara – Sultra;
35. Futong Industry Park – Riau;
36. Pulau Penebang Industrial Park – Kalbar;
37. Kumai Multi Energi Industrial Park – Kalteng;
38. Alumina Toba Industrial Park – Kalbar;
39. Indo Mineral Mining Industrial Park – Sulteng;

40. Tabuk Industrial Park – Kalteng;
41. Rimau Industrial Park – Kalteng;
42. Ibu Kota Nusantara (IKN);
43. Pelabuhan Patimban – Jabar;
44. Jakarta MRT Koridor Timur-Barat;
45. Jalan Tol Serang–Panimbang – Banten;
46. Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi – Jatim;
47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban – Jabar; dan
48. Jakarta Sewerage System.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mendukung 2 (dua) Program Nasional yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7.
Tabel Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penanggulangan kemiskinan								
1)	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
a.			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	125.000.000,00	125.192.500,00	129.017.676,00	134.263.208,00	134.462.192,00	Menjadi dasar perencanaan pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
b.			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Menjamin keberlanjutan pelayanan air minum yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), khususnya dalam mendukung target 100% akses air minum aman di RPJMN 2025–2029
2)		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.500.000.000,00	2.614.864.100,00	2.651.905.710,00	2.702.701.539,00	2.704.628.429,00	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada 6 UPTD
3)		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
a.			Pemeliharaan Rutin Jalan	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	Pemeliharaan jalan kabupaten pada 6 wilayah UPTD
2	Pertumbuhan Ekonomi								
1)	Kemudahan Perizinan di Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000,00	250.665.000,00	263.879.244,00	282.000.173,00	282.687.573,00	KKPR merupakan instrumen yang memastikan setiap kegiatan pembangunan, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW/RDTR) yang berlaku

4.6. Program Delegasi Gubernur Kepada Kabupaten/Kota dan Program *Mandatory* Pusat

Program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari Gubernur (sebagai wakil pemerintah pusat) kepada Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, yang telah diatur dalam regulasi terkait Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta pendoman pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan program delegasi Gubernur kepada kabupaten/kota maupun program *mandatory* pusat.

Tabel 4.8.
Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI PROVINSI KE KABUPATEN KOTA	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

Tabel 4.9.
Tabel Kegiatan Prioritas Utama RPJMD 2025-2029

NO	PROGRAM MANDATORY PUSAT KE KABUPATEN KOTA	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T. M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas		Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik (%)	54,61	61,96	66,54	71,11	75,67	80,27	80,61	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum (%)	55,79	62,12	62,88	63,63	64,37	65,21	65,82	
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas (%)	53,43	61,61	70,20	78,58	86,97	93,34	95,39	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	85,60	85,65	85,70	85,75	85,80	85,85	85,90	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,75	73,80	73,85	73,90	73,95	74,00	74,05	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					43.439.882.572,00		54.225.131.480,00		55.831.825.413,00		48.582.367.884,00		41.169.617.834,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.963.362.572,00		11.054.780.010,00		11.232.508.078,00		11.571.143.371,00		11.529.743.832,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan kinerja administrasi keuangan, umum dan jasa perundang perangkat daerah (%)	100	100	100	10.963.362.572,00	100	11.054.780.010,00	100	11.232.508.078,00	100	11.571.143.371,00	100	11.529.743.832,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.063.000.000,00		3.065.144.100,00		3.107.749.803,00		3.166.175.296,00		3.166.391.618,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	58,67	58,75	59,26	3.063.000.000,00	59,77	3.065.144.100,00	60,00	3.107.749.803,00	61,56	3.166.175.296,00	61,86	3.166.391.618,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					275.000.000,00		275.192.500,00		279.017.676,00		284.263.208,00		284.482.192,00	
Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	59,01	59,01	59,02	275.000.000,00	59,03	275.192.500,00	59,04	279.017.676,00	59,06	284.263.208,00	59,06	284.482.192,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	19,08	25,64	31,14		35,63		40,13		44,62		48,31		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Stop Minum Perpipaan (%)	19,08	25,63	31,13		35,62		40,12		44,61		48,3		
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.088.000.000,00		1.088.761.600,00		1.103.895.366,00		1.124.648.620,00		1.125.435.674,00	
Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Persentase saluran drainase kondisi baik (%)	69,18	69,20	69,25	1.088.000.000,00	69,30	1.088.761.600,00	69,35	1.103.895.366,00	69,40	1.124.648.620,00	69,45	1.125.435.674,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.245.000.000,00		2.246.571.500,00		2.277.798.843,00		2.320.621.482,00		2.322.245.887,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	-	80	80,25	2.245.000.000,00	80,50	2.246.571.500,00	80,75	2.277.798.843,00	81	2.320.621.482,00	81,25	2.322.245.887,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase penertiban PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG (%)	82,84	84,24	84,64		85		85,43		85,84		86,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.733.000.000,00		15.407.421.000,00		16.450.291.291,00		6.333.201.587,00		941.775.432,00	
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik (%)	88,61	88,82	88,83	4.733.000.000,00	88,84	15.407.421.000,00	88,85	16.450.291.291,00	88,86	6.333.201.587,00	88,87	941.775.432,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	6,95	10,12	10,13		10,14		10,15		10,16		10,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					20.060.000.000,00		20.074.042.000,00		20.353.071.184,00		20.735.708.922,00		20.750.223.918,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamagitan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Melayang Kewarungan Kabupaten/Kota (%)	88,92	88,50	88,85	20.060.000.000,00	90,18	20.074.042.000,00	90,54	20.353.071.184,00	90,88	20.735.708.922,00	91,23	20.750.223.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Jembaran dalam kondisi baik (%)	94,36	94,36	94,37		94,38		94,39		94,40		94,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan (%)	22,59	22,59	22,62		22,64		22,67		22,69		22,72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.488,00	
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina (%)	-	100	100	62.500.000,00	100	62.543.750,00	100	63.413.108,00	100	64.605.275,00	100	64.650.488,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					950.000.000,00		950.685.000,00		963.879.244,00		982.000.173,00		982.587.573,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang (%)	90,18	90,28	90,36	950.000.000,00	90,48	950.685.000,00	90,58	963.879.244,00	90,68	982.000.173,00	90,78	982.587.573,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan (%)	18,57	33,34	50,01		68,68		83,35		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					43.438.862.572,00		54.225.131.480,00		55.831.625.413,00		48.582.387.884,00		41.169.817.634,00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum			Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik (%)		
					Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum (%)		
			Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Panjang jaringan irigasi yang dikelola	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan		Persentase saluran drainase kondisi baik (%)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
					Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SiMBG (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya		Persentase Trotoar Kondisi Baik (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
					Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Panjang jalan yang dikelola dan jumlah jembatan yang dikelola	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi		Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Jumlah lembaga konstruksi yang dibina	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang		Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas (%)		
					Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Jumlah RDTR yang ditetapkan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase ketersediaan laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	19,08	26,63	31,13	35,62	40,12	44,61	48,3	
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,08	26,63	31,13	35,62	40,12	44,61	48,30	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	58,87	58,75	59,26	59,77	60,00	61,56	61,66	
2	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	88,92	89,5	89,85	90,19	90,54	90,88	91,23	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Tingkat Kematapan Jalan kabupaten/kota	%	88,92	89,5	89,66	89,8	89,95	90,1	90,25	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	96,47	96,67	96,87	97,07	97,27	97,47	97,67	
3	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	98,66	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	
6	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	90,28	90,38	90,48	90,58	90,68	90,78	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				43.439.862.572,00		54.225.131.460,00		55.831.925.413,00		48.582.367.894,00		41.169.617.634,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.963.362.572,00		11.054.780.010,00		11.232.509.078,00		11.571.143.371,00		11.529.743.632,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	10.963.362.572,00	100	11.054.780.010,00	100	11.232.509.078,00	100	11.571.143.371,00	100	11.529.743.632,00	1.03.000.000.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.040.491.618,00		10.322.701.786,00		10.444.397.512,84		10.661.840.670,55		10.766.034.465,18		
Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	122	10.040.491.618,00	122	10.322.701.786,00	122	10.444.397.512,84	122	10.661.840.670,55	122	10.766.034.465,18		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.040.491.618,00		10.322.701.786,00		10.444.397.512,84		10.661.840.670,55		10.766.034.465,18		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	122	10.040.491.618,00	122	10.322.701.786,00	122	10.444.397.512,84	122	10.661.840.670,55	122	10.766.034.465,18		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.000.000,00		125.875.000,00		127.624.662,50		130.024.006,15		129.672.941,34		
Persentase ketersediaan laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	12	130.000.000,00	12	125.875.000,00	12	127.624.662,50	12	130.024.006,15	12	129.672.941,34		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	48		48		48		48		48			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	12		12		12		12		12		12	
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.070.000,00		10.209.973,00		10.401.920,49		10.373.835,31		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	12	10.000.000,00	12	10.070.000,00	12	10.209.973,00	12	10.401.920,49	12	10.373.835,31		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.210.000,00		30.629.919,00		31.205.761,48		31.121.505,92		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	48	30.000.000,00	48	30.210.000,00	48	30.629.919,00	48	31.205.761,48	48	31.121.505,92		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000,00		15.105.000,00		15.314.969,50		15.602.880,74		15.560.752,96		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	12	20.000.000,00	12	15.105.000,00	12	15.314.969,50	12	15.602.880,74	12	15.560.752,96		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.140.000,00		20.419.946,00		20.803.840,98		20.747.670,61		
Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	12	20.000.000,00	12	20.140.000,00	12	20.419.946,00	12	20.803.840,98	12	20.747.670,61		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.350.000,00		51.049.865,00		52.009.602,46		51.869.176,54		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	12	50.000.000,00	12	50.350.000,00	12	51.049.865,00	12	52.009.602,46	12	51.869.176,54		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				645.370.954,00		448.661.224,00		452.860.918,85		563.499.132,15		418.835.218,16		
Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12	645.370.954,00	12	448.661.224,00	12	452.860.918,85	12	563.499.132,15	12	418.835.218,16		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		90.630.000,00		91.889.757,00		93.617.284,43		93.364.517,76		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12	100.000.000,00	12	90.630.000,00	12	91.889.757,00	12	93.617.284,43	12	93.364.517,76		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				545.370.954,00		358.031.224,00		360.971.161,85		469.881.847,72		326.470.700,40		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12	545.370.954,00	12	358.031.224,00	12	360.971.161,85	12	469.881.847,72	12	326.470.700,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.000.000,00		156.042.000,00		206.125.983,80		214.279.562,15		213.701.007,32		
Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	48	148.000.000,00	48	156.042.000,00	48	206.125.983,80	48	214.279.562,15	48	213.701.007,32		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	51		51		51		51		51			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		208.038.409,85		207.476.706,14		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	48	136.000.000,00	48	150.000.000,00	48	200.000.000,00	48	208.038.409,85	48	207.476.706,14		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		6.042.000,00		6.125.983,80		6.241.152,30		6.224.301,18		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	51	10.000.000,00	51	6.042.000,00	51	6.125.983,80	51	6.241.152,30	51	6.224.301,18		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				3.063.000.000,00		3.065.144.100,00		3.107.749.603,00		3.166.175.296,00		3.168.391.618,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	58,87	59,26	3.063.000.000,00	59,77	3.065.144.100,00	60,00	3.107.749.603,00	61,56	3.166.175.296,00	61,66	3.168.391.618,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.105.000,00		152.191.460,00		155.052.659,00		155.161.196,00		
Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	-	3	150.000.000,00	3	150.105.000,00	3	152.191.460,00	3	155.052.659,00	3	155.161.196,00		
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				150.000.000,00		150.105.000,00		152.191.460,00		155.052.659,00		155.161.196,00		
Terehabitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	-	3	150.000.000,00	3	150.105.000,00	3	152.191.460,00	3	155.052.659,00	3	155.161.196,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.913.000.000,00		2.915.039.100,00		2.955.558.143,00		3.011.122.637,00		3.013.230.422,00		
Panjang jaringan irigasi yang dikelola	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	-	-	2.913.000.000,00	-	2.915.039.100,00	-	2.955.558.143,00	-	3.011.122.637,00	-	3.013.230.422,00		
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	-	2		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	-	3		3		3		3		3			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	859,43	859,43		859,43		859,43		859,43					
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	8,931	0,016		0,016		0,016		0,016		0,016		0,016	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				150.000.000,00		150.105.000,00		152.191.460,00		155.052.659,00		155.161.196,00		
Terehabitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	8,931	0,016	150.000.000,00	0,016	150.105.000,00	0,016	152.191.460,00	0,016	155.052.659,00	0,016	155.161.196,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02.0001 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				2.500.000.000,00		2.614.864.100,00		2.651.905.710,00		2.702.701.539,00		2.704.628.429,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	859,43	859,43	2.500.000.000,00	859,43	2.614.864.100,00	859,43	2.651.905.710,00	859,43	2.702.701.539,00	859,43	2.704.628.429,00		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				100.000.000,00		100.070.000,00		101.460.973,00		103.368.439,00		103.440.797,00		
Terfasilitasnya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	-	3	100.000.000,00	3	100.070.000,00	3	101.460.973,00	3	103.368.439,00	3	103.440.797,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				163.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	-	2	163.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				275.000.000,00		275.192.500,00		279.017.676,00		284.263.208,00		284.462.192,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan				
Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	59,01	59,02	275.000.000,00	59,03	275.192.500,00	59,04	279.017.676,00	59,05	284.263.208,00	59,06	284.462.192,00					
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	19,08	31,14				35,63				40,13				44,62		48,31
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	19,08	31,13				35,62				40,12				44,61		48,3
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari (%)	100	100				100				100				100		
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				275.000.000,00		275.192.500,00		279.017.676,00		284.263.208,00		284.462.192,00					
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	-	1	275.000.000,00	1	275.192.500,00	1	279.017.676,00	1	284.263.208,00	1	284.462.192,00					
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	-	5				5				5				5		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				125.000.000,00		125.192.500,00		129.017.676,00		134.263.208,00		134.462.192,00					
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	-	5	125.000.000,00	5	125.192.500,00	5	129.017.676,00	5	134.263.208,00	5	134.462.192,00					
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00					
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.088.000.000,00		1.088.761.600,00		1.103.895.386,00		1.124.648.620,00		1.125.435.874,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	
Meningkatnya kualitas pringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik (%)	69,15	69,25	1.088.000.000,00	69,30	1.088.761.000,00	69,35	1.103.895.386,00	69,40	1.124.648.620,00	69,45	1.125.435.874,00		
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.088.000.000,00		1.088.761.600,00		1.103.895.386,00		1.124.648.620,00		1.125.435.874,00		
Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	3	1	1.088.000.000,00	1	1.088.761.600,00	1	1.103.895.386,00	1	1.124.648.620,00	1	1.125.435.874,00		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	6	6		6		6		6		6			
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				688.000.000,00		688.481.600,00		698.051.494,00		711.174.862,00		711.672.685,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	3	1	688.000.000,00	1	688.481.600,00	1	698.051.494,00	1	711.174.862,00	1	711.672.685,00		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				400.000.000,00		400.280.000,00		406.843.892,00		413.473.758,00		413.763.189,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	6	6	400.000.000,00	6	400.280.000,00	6	406.843.892,00	6	413.473.758,00	6	413.763.189,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				2.245.000.000,00		2.246.571.500,00		2.277.798.843,00		2.320.621.462,00		2.322.245.897,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%)	-	80,25	2.245.000.000,00	80,50	2.246.571.500,00	80,75	2.277.798.843,00	81	2.320.621.462,00	81,25	2.322.245.897,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG (%)	62,84	64,64		65		65,42		65,84		66,26			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laki Fungsi Bangunan Gedung				2.245.000.000,00		2.246.571.500,00		2.277.798.843,00		2.320.621.462,00		2.322.245.897,00		
Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	-	80	2.245.000.000,00	80	2.246.571.500,00	80	2.277.798.843,00	80	2.320.621.462,00	80	2.322.245.897,00		
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahausan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000.000,00		1.821.571.500,00		1.852.798.843,00		1.895.621.462,00		1.897.245.897,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahausan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	-	2	1.750.000.000,00	2	1.821.571.500,00	2	1.852.798.843,00	2	1.895.621.462,00	2	1.897.245.897,00		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				370.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Diawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	-	1	370.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	-	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00	80	125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00		
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik (%)	68,61	68,63	4.733.000.000,00	68,64	15.407.431.000,00	68,65	16.450.291.291,00	68,66	8.333.201.567,00	68,67	941.776.432,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten (%)	6,95	10,13		10,14		10,15		10,16		10,17			
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00		
Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	-	2	4.733.000.000,00	2	15.407.431.000,00	1	16.450.291.291,00	2	8.333.201.567,00	1	941.776.432,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				4.733.000.000,00		15.407.431.000,00		16.450.291.291,00		8.333.201.567,00		941.776.432,00		
Terdaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	-	2	4.733.000.000,00	2	15.407.431.000,00	1	16.450.291.291,00	2	8.333.201.567,00	1	941.776.432,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				20.060.000.000,00		20.074.042.000,00		20.353.071.184,00		20.735.708.922,00		20.750.223.918,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mertap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	88,92	89,85	20.060.000.000,00	90,19	20.074.042.000,00	90,54	20.353.071.184,00	90,88	20.735.708.922,00	91,23	20.750.223.918,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	94,36	94,37		94,38		94,39		94,40		94,41			
	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan (%)	22,69	22,82		22,64		22,67		22,68		22,72			
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				20.060.000.000,00		20.074.042.000,00		20.353.071.184,00		20.735.708.922,00		20.750.223.918,00		
Panjang jalan yang dikelola dan jumlah jembatan yang dikelola	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	16	20	20.060.000.000,00	22	20.074.042.000,00	22	20.353.071.184,00	26	20.735.708.922,00	26	20.750.223.918,00		
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6			2		2		3		3			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	650,476	650,476		650,476		650,476		650,476		650,476			
	Panjang Jalan yang Dlebarakan Menurut Standar (KM)	2,202	0,661		0,661		0,661		0,661		0,661			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,208	-		0,145		0,145		0,145		0,145			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,304	0,39		0,415		0,438		0,329		0,33			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1,144	1,45		0,415		0,438		0,329		0,33			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	2	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				150.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	650,476	650,476	150.000.000,00	650,476	450.000.000,00	650,476	450.000.000,00	650,476	450.000.000,00	650,476	450.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				8.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	16	20	8.000.000.000,00	22	10.000.000.000,00	22	10.000.000.000,00	26	10.000.000.000,00	26	10.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				4.258.000.000,00		3.534.396.000,00		3.621.749.104,00		3.216.537.988,00		3.221.082.064,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1,144	1,45	4.258.000.000,00	0,415	3.534.396.000,00	0,438	3.621.749.104,00	0,329	3.216.537.988,00	0,33	3.221.082.064,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				0,00		1.505.250.000,00		1.609.572.976,00		2.752.632.946,00		2.758.059.790,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0,208	-	0,00	0,145	1.505.250.000,00	0,145	1.609.572.976,00	0,145	2.752.632.946,00	0,145	2.758.059.790,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				4.443.000.000,00		1.534.396.000,00		1.621.749.104,00		1.216.537.988,00		1.221.082.064,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,304	0,39	4.443.000.000,00	0,415	1.534.396.000,00	0,438	1.621.749.104,00	0,329	1.216.537.988,00	0,33	1.221.082.064,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6		200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tertaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	2.202	0,661	2.500.000.000,00	0,661	2.500.000.000,00	0,661	2.500.000.000,00	0,661	2.500.000.000,00	0,661	2.500.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina (%)	-	100	62.500.000,00	100	62.543.750,00	100	63.413.108,00	100	64.605.275,00	100	64.650.498,00		
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00		
Jumlah lembaga konstruksi yang dibina	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	-	30	62.500.000,00	30	62.543.750,00	30	63.413.108,00	30	64.605.275,00	30	64.650.498,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				62.500.000,00		62.543.750,00		63.413.108,00		64.605.275,00		64.650.498,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	-	30	62.500.000,00	30	62.543.750,00	30	63.413.108,00	30	64.605.275,00	30	64.650.498,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				950.000.000,00		950.665.000,00		963.879.244,00		982.000.173,00		982.687.573,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang (%)	90,18	90,38	950.000.000,00	90,48	950.665.000,00	90,58	963.879.244,00	90,68	982.000.173,00	90,78	982.687.573,00	1.03.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	
	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan (%)	16,67	50,01		56,68		83,35		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Jumlah RDTR yang ditetapkan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	600.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				600.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	600.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		250.665.000,00		263.879.244,00		282.000.173,00		282.687.573,00		
Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	-	1	150.000.000,00	1	250.665.000,00	1	263.879.244,00	1	282.000.173,00	1	282.687.573,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				150.000.000,00		250.665.000,00		263.879.244,00		282.000.173,00		282.687.573,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	-	1	150.000.000,00	1	250.665.000,00	1	263.879.244,00	1	282.000.173,00	1	282.687.573,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
2.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	55,79	62,12	62,88	63,63	64,37	65,21	65,82	
3.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	53,43	61,81	70,20	78,58	88,97	95,34	95,39	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas tan lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		%	100	90,28	90,38	90,48	90,58	90,68	90,78	
3.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio luas daerah ingasi kewenangan kabupaten/kota yang diayahi oleh jaringan ingasi		%	98,66	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		%	96,47	96,67	96,87	97,07	97,27	97,47	97,67	
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal		%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		%	88,92	89,5	89,65	89,8	89,95	90,1	90,25	
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kecelakaan		%	100	100	100	100	100	100	100	